

## KILAS KEBIJAKAN PSPK

# Kajian Peningkatan Kualitas Madrasah: Membangun Profesionalitas Manajemen Madrasah Swasta

Farhanah Fitria Mustari (Research Fellow PSPK Batch 1)

## Pendahuluan

Manajemen sekolah yang profesional adalah salah satu aspek penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini terdapat pada landasan dasar bagi pelaku pendidikan yang merujuk kepada **Undang-Undang Sistem Pendidikan No. 02 tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003**, diiringi **Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 mengenai Standar Nasional Pendidikan Panduan Teknis Nasional Pendidikan (SNP)**. Di dalam regulasi tersebut termaktub butir-butir standarisasi yang terdiri dari standar isi, standar proses, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian pendidikan. Sekolah/madrasah perlu memiliki keterampilan manajemen untuk menjaga mutu pendidikannya, yaitu kemampuan merancang dan mengorganisir pihak internal (guru, kurikulum, siswa) dan eksternal (orang tua siswa, pengawas, komite, masyarakat) secara strategis, praktis, dan sistematis. Saat ini, peningkatan mutu pendidikan dalam kerangka mekanisme otonomi daerah telah mengubah orientasi dan model pelaksanaan dari model sentralisasi menjadi model pendidikan desentralisasi (Aziz, 2015). Sehingga, madrasah menjadi mempunyai keleluasaan untuk mencapai mutu pendidikan yang ideal.

Kebijakan Madrasa-Based Management atau Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) memberikan panduan berupa model bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala madrasah dan guru dibantu oleh komite madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Bentuk otonomi ini membuat Madrasah memiliki kewenangan lebih dalam mengelola pendidikan dalam Madrasah. Pembahasan mengenai MBM terdapat dalam **UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51** yang menyatakan bahwa *"Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah."* Akan tetapi, tidak ada regulasi atau payung hukum khusus yang membahas mengenai MBM ini. Sehingga, MBM yang sepatutnya meningkatkan segi kualitas dan daya saing pada Madrasah Swasta berujung pada konsekuensi sebaliknya dimana dominasi Madrasah Swasta pada umumnya masih di bawah "standar nasional",\*<sup>1</sup> terutama dalam hal tata kelola (Hamdan, 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas madrasah swasta dan perlu dilihat secara holistik (input - proses- output). Maka, kebijakan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) sekiranya mampu memberikan ruang potensi sekaligus tantangan dalam aspek peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan pendidikan bagi Madrasah Swasta.

\*Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP Nomor 57 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 2)

## Pendekatan

Dokumen kilas kebijakan ini merupakan hasil kajian Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) terhadap implementasi manajerial di Madrasah Swasta sebagai bagian dari proses peningkatan mutu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memberikan ruang eksplorasi mendalam, kajian ini menyasar dua studi kasus Madrasah Ibtidaiyah Swasta (setara dengan SD) di Kota Bandung dengan sistem manajerial yang berbeda. Pertama adalah Madrasah yang berbasis sumbangan dan berada di bawah lembaga swadaya masyarakat (NGO). <sup>2</sup>Kedua adalah Madrasah yang berbasis iuran wajib dan berada di bawah Yayasan. <sup>3</sup>Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan (Maret - Mei 2022) dan dimulai dari tahap persiapan hingga finalisasi penulisan laporan.

Penulis mengambil perspektif dari manajemen pendidikan yakni sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan (Soebagio Atmodiwirio, 2000:23). Adapun metode pengambilan data dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) bersama Kepala Madrasah (1 orang), perwakilan Guru (3 orang), perwakilan siswa (1 orang), perwakilan alumni, (1 orang) dan perwakilan orang tua murid (1 orang) sekaligus observasi lapangan. Hasil kajian ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana kesempatan desentralisasi manajemen mampu mendorong madrasah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif serta realita praktek manajerial yang dihadapi madrasah swasta.

## Permasalahan Manajemen Madrasah Swasta

### *Proses manajerial yang terjadi dalam Madrasah Swasta dan dampaknya*

Tak dapat dipungkiri bahwasanya di Indonesia, madrasah muncul dari gagasan progresif yang merespon sikap pesantren yang menjauhi perkembangan zaman. Sehingga, Madrasah Swasta banyak yang berlomba-lomba menawarkan berbagai kelebihan dari ciri khas dan budayanya untuk menjaring peserta didik. Contohnya adalah aspek manajemen pembiayaan yang berbasis sumbangan atau iuran, yang sangat beragam di konteks Madrasah Swasta. Meskipun secara kuantitatif madrasah di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, tetapi secara kualitatif prestasi madrasah masih sangat memprihatinkan.

Temuan observasi penelitian ini menunjukkan faktor geografis menjadi salah satu alasan adanya keragaman jenis Madrasah Swasta tersebut.

Misalnya, madrasah yang berbasis sumbangan terletak di pusat kota tetapi berada di daerah yang kumuh dan padat. Sedangkan, madrasah yang berbasis iuran meski terletak jauh dari pusat kota tetapi dekat dengan jalan protokol (jalan utama). Melihat lebih dalam dari studi kasus penelitian ini, madrasah yang berbasis sumbangan menarik perhatian **70%** warga miskin untuk melanjutkan pendidikan karena tak terikat kewajiban SPP. Sedangkan, madrasah yang berbasis iuran hanya menarik perhatian **10%** warga miskin dengan ketentuan program subsidi silang dari **90%** warga menengah ke atas yang rela membayar iuran.

<sup>4</sup>Sehingga, fenomena ini memperlihatkan secara gamblang dampak kualitas pendidikan yang berhubungan dengan implementasi tata kelola madrasah (Tim Peneliti Puslitbang Penda—UPI Bandung, 2007). Tabel di bawah ini memberikan rangkuman karakteristik dari dua tipe Madrasah Swasta yang diteliti.

**Tabel I. Karakteristik Madrasah Ibtidaiyah Swasta**

|  | Input   | Proses  | Output   |
|--|---|---|--|
| <b>Madrasah Berbasis Sumbangan - (X)</b><br>(Akreditasi A) | <p>Tipe kepemimpinan Kepala Madrasah yang cenderung transformasional.</p> <p>Guru dipandang sebagai tenaga pendidik bersifat honorer dan semi-sukarelawan.</p> <p>Penerimaan siswa baru dilakukan secara partisipatif masyarakat.</p> <p>Sumbangan diibaratkan sebagai infaq dan tidak bersifat wajib bagi orang tua murid.</p> | <p>Kegiatan belajar &amp; mengajar mayoritas melibatkan ilmu keagamaan yang bersifat kognitif dan sisanya adalah mata pelajaran pada umumnya.</p> <p>Jarang ada koordinasi manajemen dan lebih bersifat insidental.</p> <p>Guru banyak yang multiperan tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga tenaga nondik.</p> <p>Sekolah dilakukan setengah hari.</p> | <p>Siswa lulus dengan kompetensi dasar yang mampu menjadi rujukan untuk menempuh pendidikan SMP atau Mts.</p> <p>Mayoritas siswa serta orang tuanya memutuskan untuk memilih pesantren dengan pertimbangan biaya murah &amp; gratis.</p> <p>Dalam aspek perkembangan mental, orang tua siswa merasa ada perubahan secara aspek kerohanian dan karakter agamis.</p> |

<sup>1</sup>Disingkat Madrasah (Y)

<sup>2</sup>Disingkat Madrasah (X)

<sup>3</sup>Data Primer Penelitian (Wawancara)

|  | Input  | Proses   | Output   |
|--|--|--|--|
| <b>Madrasah Berbasis Iuran - (Y)</b><br><br>(Akreditasi A) | <p>Tipe kepemimpinan Kepala Madrasah yang lebih <i>service &amp; democratic leader</i>.</p> <p>Guru dipandang sebagai SDM yang profesional.</p> <p>Siswa dipilih berdasarkan sistem seleksi yang terukur.</p> <p>Di awal penerimaan siswa, terdapat skema biaya pembangunan di luar aspek iuran bulanan.</p> | <p>Kegiatan belajar &amp; mengajar melibatkan partisipasi siswa untuk terbiasa merefleksikan pembelajaran agama dengan pembelajaran sosial-emosional mereka.</p> <p>Koordinasi manajerial antar peran dilakukan secara rutin &amp; berkala.</p> <p>Guru dituntut untuk membuat berbagai metode pengajaran kreatif.</p> <p>Terdapat hubungan dua arah antara guru dengan orang tua murid.</p> <p>Sekolah dilakukan secara <i>full time</i> (pagi-sore).</p> | <p>Siswa lulus dengan kelebihan berupa pemahaman agama yang ditandai dari hafalan surat dan kemampuan membaca kitab suci dengan benar.</p> <p>Siswa serta orang tua mayoritas memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan di bawah naungan Yayasan/Organisasi yang serupa.</p> <p>Dalam aspek perkembangan mental, orang tua merasa bahwa anaknya berubah menjadi lebih agamis dan peningkatan keterampilan sosial.</p> |

*Apakah akreditasi Madrasah Swasta menggambarkan proses manajemen mutu pendidikan yang ideal?*

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal (60) menegaskan peranan akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal sebagai bagian dari peningkatan mutu di bidang pendidikan. Temuan di lapangan dari kedua madrasah swasta yang diteliti telah **terakreditasi A**, sebagai cakupan kinerja yang terstandarisasi. Namun, situasi di satuan Madrasah Swasta menerangkan hasil akreditasi bersifat formalitas yang berdampak pada peningkatan status pemasaran (*branding*).

*“Biasanya kita akan membentuk kelompok kerja untuk persiapan akreditasi yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Karena, ada akreditasi seperti mendapat ‘gengsi’ dan membantu sekolah untuk menerima siswa baru. Jadi, kita sangat mengejar akreditasi A.”*

Guru (DW) di Madrasah (Y)

Sepatutnya, akreditasi tidak menjadi ajang peningkatan kuantitas dan pencitraan semata sehingga luput dengan aspek kualitas. Dari pernyataan tersebut mendukung kondisi persiapan menjelang akreditasi bersifat insidental ketimbang konsisten membentuk mutu dalam keseharian. Hasil akreditasi yang didapatkan merupakan dampak dari komitmen kepala sekolah, pengawas dan seluruh warga sekolah untuk selalu menjaga dan meningkatkan mutu sekolah (Raharjo, 2013). Sehingga, manajemen mutu sekolah yang baik, tentunya akan meningkatkan mutu sekolah (Schomaker, 2015).

## Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Madrasah

MBM pada hakikatnya dilaksanakan oleh seluruh madrasah baik negeri maupun swasta dalam rangka untuk meningkatkan mutu dari madrasah itu sendiri. Ruang otonomi ini perlu ditanggapi secara responsif oleh pihak Yayasan/Lembaga terkait untuk melakukan improvisasi mutu pendidikan. Sehingga, keberhasilan MBM setidaknya dicirikan dengan indikator berupa penguatan kepemimpinan yang transformatif dan demokratis hingga peningkatan kemandirian sekolah dalam menghadapi tantangan pendidikan. Akan tetapi, temuan di lapangan menunjukkan pengetahuan mengenai konsep MBM ini hanya dimiliki oleh kepala madrasah tanpa pendalaman pengetahuan hingga informasi kepada pihak guru bahkan masyarakat. Adapun isu lainnya adalah pengetahuan tentang urgensi MBM tidak diimplementasikan melalui koordinasi dengan pihak yayasan/kelembagaan. Indikasi penyebab dari fenomena ini adalah adanya dualisme manajerial di satuan pendidikan Islam yakni antara kepala madrasah dan ketua yayasan (atau pengurus) yang seringkali di dalam praktik terjadi tumpang tindih (Suryana, 2018).

Di sisi lain, masih ada madrasah yang menjadikan kesempatan praktek MBM sebagai implementasi manajemen pendidikan yang mampu meningkatkan mutu seperti yang ditemukan pada Madrasah (X). Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari kedua studi kasus tampak jelas bahwa pengalaman teknis dan pengetahuan manajemen pendidikan bergantung erat pada kapasitas pemimpin. Hal ini selaras dengan penerapan MBM yang meliputi lima komponen, yakni: **perencanaan program, pelaksanaan program, kepemimpinan**

**kepala madrasah, pengawasan/evaluasi, dan sistem informasi madrasah** (Hidayat, 2016). Sayangnya, konsep ini tidak mendapatkan tindak lanjut yang saling berkaitan dengan aspek lainnya seperti apakah penerapan MBM ini berhubungan dengan aspek akreditasi serta bagaimana penilaian/monitoring Kementerian Agama melalui dinas terkait untuk memastikan lima alur tersebut berjalan dengan ideal. Lebih dari itu akan sangat disayangkan jika pelatihan MBM ini hanya diwakili oleh kepala madrasah tanpa adanya urgensi pemahaman serupa terhadap kepala yayasan maupun guru sebagai tenaga pendidik.

## Merefleksikan Kembali Alur Manajemen Madrasah Swasta

Merespon permasalahan kualitas manajemen pendidikan yang terjadi di Madrasah Swasta serta kritik terhadap efektivitas konsep MBM, membutuhkan refleksi dari kerangka *input-process-output* tentang bagaimana sebaiknya manajemen madrasah diberlakukan. **Pertama adalah urgensi kepemimpinan dan keterlibatan dua arah.** Kepemimpinan di level sekolah menjadi faktor penentu kualitas sekolah dan sangat disayangkan apabila Kepala Madrasah hanya berkuat pada aktivitas administratif (Dzulfikar, 2020). Selain itu, harmonisasi hubungan antara Pihak Yayasan dengan Kepala Madrasah menjadi penentu kejelasan tupoksi dan jalur koordinasi yang efektif. Secara kontras, temuan di lapangan memperlihatkan dampak keleluasaan MBM terhadap madrasah dan lembaga yang menaunginya. Contohnya Kepala Madrasah di bawah sistem berbasis sumbangan cenderung fokus pada tata kelola pembiayaan untuk memenuhi dibandingkan aspek manajemen lainnya seperti manajemen kurikulum & pengembangan guru.

*"Sejujurnya, kami sudah berkali-kali mengajukan aspirasi menjadikan pembiayaan siswa berbasis iuran rutin dibandingkan infaq. Namun, pimpinan cabang kami tidak mengizinkan karena visi pendirian Madrasah kami ini perlu memberikan akses kemudahan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah."*

Kepala Madrasah (EL) di Madrasah (Y)

Sebaliknya, Kepala Madrasah di bawah sistem berbasis iuran memiliki gerak leluasa untuk mengelola dan mengawasi alur manajemen tanpa terbebani oleh kesulitan pembiayaan. Selain itu, sering dijumpai Kepala Madrasah memiliki kompetensi di bidang agama cukup baik, namun terdapat kekurangan dalam kompetensi manajemen. Ini disebabkan sebagian besar Kepala

Madrasah lulusan dari Perguruan Tinggi Agama Islam serta mayoritas berlatar belakang pesantren, sehingga aplikasi ilmu dan pengalaman manajemen pendidikan masih perlu ditingkatkan.

**Kedua adalah kualitas performa guru dan manajemen pembiayaan ideal.** Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan yayasan yang memiliki dukungan dana dan infrastruktur yang memadai, dapat menata manajemennya secara baik, serta memberi kesejahteraan finansial kepada para tenaga pendidik. Sebaliknya, apabila yayasan tidak memiliki kesiapan dana yang cukup maka terkendala dalam bidang pembangunan sarana-prasarana hingga kualitas terhadap kinerja performa guru (Alawiyah, 2014). Pendidik alias Guru merupakan tumpuan agar proses dalam manajemen pendidikan dapat berjalan dengan maksimal sehingga mampu menghasilkan output lulusan yang siap memasuki jenjang berikutnya. Hal ini seperti yang tersampaikan oleh salah satu informan Guru di Madrasah (X):

*"Insentif yang saya dapatkan lebih dari cukup dan beban kerjanya pun teratur. Sehingga, kami para Guru hanya fokus pada peran mendidik tanpa terbebani oleh nasib insentif. Bahkan, kami juga selalu didorong untuk mengikuti pelatihan dan peningkatan jenjang pendidikan"*

Guru (LS) di Madrasah (X)

**Ketiga adalah implementasi kurikulum Madrasah yang berkarakter.** Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tugas madrasah adalah mempersiapkan peserta didik menguasai penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama dan juga menyertakan pengetahuan umum (Ikhwan, 2022). Artinya, madrasah memiliki peran penting dalam proses transmisi ilmu dan karakter positif terhadap kematangan intelektual serta spiritual. Sangat disayangkan jika potensi ini terhambat tanpa input yang memadai serta peluang MBM yang mendorong kemajuan inovasi dan kreasi para guru dalam mendidik. Terlebih dengan sering terjadi pembaharuan kurikulum nasional perlu segera tersampaikan kepada guru di Madrasah Swasta serta bagaimana Kementerian Agama memberikan panduan untuk kurikulum berbasis agama yang selaras dengan kurikulum nasional.

**Keempat adalah kenyamanan peserta didik dan kesadaran orang tua murid.** Madrasah memang masih menarik perhatian masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah berkebalikan sarana & prasarana, namun juga biaya yang perlu dikeluarkan. **Manajemen pelayanan** tidak dipungkiri berperan untuk menjadikan madrasah sebagai tempat belajar yang aman dan nyaman.

**Aman** menandakan bahwa siswa tidak mengalami kendala pemenuhan kebutuhan belajar serta orang tua siswa percaya untuk 'menitipkan' anaknya di madrasah.

*"Saya memegang prinsip adab sebelum ilmu (akhlak itu duluan karena pembentukan akhlak itu secara interpretasi otak lebih kompleks dibandingkan akademis, hal ini yang menjadi salah satu alasan saya mendaftarkan anak-anak ke madrasah ini serta karena melihat kualitas dari anak pertama saya disini, akhirnya saya memilih untuk mendaftarkan adik-adiknya di disini juga."*

Orang Tua Siswa (Bu WN) di Madrasah (X)

*"Ketika masuk ke MI anak saya jadi lebih baik dan ada peningkatan kualitas hafalannya dan bangga melihat anak bisa melakukan hal-hal yang kalau diajarkan oleh saya di rumah dia tidak mau seperti hafalan surat"*

Orang Tua Siswa (Bu WN) di Madrasah (X)

## Rekomendasi

Berdasarkan uraian permasalahan di atas kami mendorong pemangku kebijakan seperti **pemerintah daerah, dinas pendidikan daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, kelompok kerja madrasah (KKM), orang tua melalui komite madrasah, serta ketua Yayasan** untuk memperhatikan dan memfasilitasi Madrasah Swasta agar terjaga mutu pendidikannya. Pertama, seperti yang telah dipaparkan dampak dari MBM mengarah pada kemandirian tata kelola yang leluasa oleh madrasah. Sehingga, kami membuat rincian rekomendasi sebagai berikut:

| No | Pemangku Kebijakan   | Rekomendasi  |
|----|--|--|
| 1  | Kementerian Agama yang berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya regulasi yang membahas khusus tentang Manajemen Berbasis Madrasah supaya terdapat acuan konkret bagi madrasah swasta dalam mengimplementasikan MBM</li> <li>2. Menciptakan dan mendorong ruang lingkup madrasah profesional dan menjadi percontohan bagi madrasah swasta lainnya dengan membentuk ekosistem organisasi pembelajar (learning organization). Selain itu, perlu mendorong lebih banyak sertifikasi guru profesional yang terbantu oleh pemerintah melalui kementerian agama. .</li> </ol>  |
| 2  | Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Pihak Yayasan/NGO               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan mendalam bagi kepala sekolah, tenaga pendidik dan stakeholder terkait Manajemen Berbasis Madrasah mulai dari bagaimana cara merumuskan kegiatan Manajemen Berbasis Madrasah, pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah hingga evaluasi Manajemen Berbasis Madrasah untuk membantu meningkatkan pemahaman satuan pendidikan terhadap Manajemen Berbasis Madrasah.</li> <li>2. Menyelaraskan alur koordinasi serta monitoring dan evaluasi (monev) antara internal sekolah, pihak kelembagaan, dan pemerintah. Koordinasi lintas kepentingan penting mengingat dampak penurunan mutu dalam proses manajerial terjadi bukan oleh satu variabel yang hanya terjadi atas kekurangan internal sekolah.</li> </ol> |

Sedangkan secara jangka panjang, kami melihat konsep Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) perlu ditinjau dan direvisi dengan lebih spesifik agar tidak salah tafsir dan kondisi profesionalisme di Madrasah Swasta lebih adil serta terbuka. Selain itu, perlu adanya kejelasan monitoring & evaluasi dampak dari MBM yang mengarah pada akreditasi madrasah.

## Referensi:

- Alawiyah, F. (2014). Pendidikan madrasah di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1), 51-58
- Aziz, A. Z. (2015). Manajemen berbasis sekolah: alternatif peningkatan mutu pendidikan madrasah. *El-Tarbawi*, 8(1), 69-92.
- Dzulfikar, T.L. (2020). Manajemen sekolah adalah kunci sukses siswa, tapi kualitas kepala sekolah di Indonesia meragukan. Retrieved May 30, 2020 from <https://theconversation.com/manajemen-sekolah-adalah-kunci-sukses-siswa-tapi-kualitas-kepala-sekolah-di-indonesia-meragukan-129626>.
- Hamdan, M. (2020). Pengelolaan Madrasah Swasta dengan Sistem Patrimonial (Studi Komparasi Yayasan Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus dengan Yayasan Manafiul Ulum Getassrabi Gebog Kudus). *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 1(2), 152-164.
- Hidayat, R. (2016). Membangun Madrasah di Indonesia Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah. *Jurnal As-Salam*, 1(2), 52-64.
- Ikhwan, A. (2022). RUU Sisdiknas dan Nasib Madrasah. Retrieved May 30, 2022 from [https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1464707-ruu-sisdiknas-dan-nasib-madrasah?page=4&utm\\_medium=page-4](https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1464707-ruu-sisdiknas-dan-nasib-madrasah?page=4&utm_medium=page-4).
- Permani, R. (2011). The presence of religious organizations, religious attendance and earnings: Evidence from Indonesia. *The Journal of Socio-Economics*, 40(3), 247-258.
- Raharjo, S. B. (2013). EVALUASI TREND KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 511–532.
- Sewang, A. (2015). Manajemen Pendidikan.
- Suryana, S. (2018). Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1).
- Schomaker, R. (2015). Accreditation and Quality Assurance in the Egyptian Higher Education System. *Quality Assurance in Education*, 23(2), 149–165.
- Tim Peneliti Puslitbang Penda—UPI Bandung. (2006). Analisis Biaya Satuan Pendidikan di Madrasah Swasta. Retrieved May 30, 2022 from <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/analisis-biaya-satuan-pendidikan-di-madrasah-swasta>.

## Disclaimer:

Kilas Kebijakan ini murni hasil refleksi pandangan peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) berdasarkan keterlibatan secara langsung dalam penelitian yang mendalami isu tentang peningkatan kualitas madrasah swasta. Kilas Kebijakan ini dapat dikutip, disebarluaskan, dan dipergunakan untuk tujuan non-komersial.

## Tentang PSPK:

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) merupakan yayasan non-profit independen yang berfokus pada penguatan kebijakan pembelajaran yang berpihak pada anak. PSPK berpijak pada data ilmiah, serta menyebarkan praktik baik di lapangan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.



### Penulis:

Farhanah Fitria Mustari  
Hatim Gazali  
Daya Cipta Sukmajati

### Editor:

Fikri Indra Muallim

### Desainer:

Lulu Safira